

**PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH, REGULASI, SISTEM
INFORMASI DAN KOMITMEN TERHADAP MANAJEMEN ASET
(STUDI PADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA)**

Rosihan¹

jurnalmkd@gmail.com

Bonifasia Elitha Bharranti²

ebonifasia@yahoo.com

Westim Ratang³

Westim_ratang@yahoo.co.id

Abstract

Each region are required to be able to manage asset efficiently and effectively. For that, this research is conducted in the government of Papua province with an examination of the influence of the quality of local officials, regulations, information system for asset managements, and commitment to the asset management. A method of descriptive applied by using questionnaire for data collection and regression to data analysis. The results of the research showed that the quality of apparatus significant and positively correlate. Hence, increasing the quality of apparatus needs to be improved through formal education and relevant technical training. Another thing to do is placement staff has to be in accordance with competence. Regulating factor showed a positive and significant influence and the binding regulations existence become a weighted point in handling regional assets. Information systems factor has a positive and significant impact for assets managements in government of Papua province. Information technology application usage has to be an important part for managing regional assets because of efficient and accurate. Leaders' commitment factor have a positive and significant impact, so that the head of SKPD which is responsible for asset usage has to make written commitment as a pact of integrity. Five factors are to be considered in managing regions assets, so that attention and act are required to increase those five factors as well.

Keyword : assets management, quality of local officials, regulation, information system, leaders commitment, government of Papua province

PENDAHULUAN

Dalam pasal 1 angka 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana dijelaskan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut pengaturannya tentang barang milik daerah selanjutnya ditetapkan dalam PP No. 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik daerah dengan pedoman teknis berupa Peraturan Mendagri No. 17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Pengelolaan asset daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.6/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan

¹ Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

² Staf Dosen Jurusan Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih

³ Staf Dosen Jurusan Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Cenderawasih

Permendagri No.17/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Regulasi ini diperkuat lagi dengan peraturan daerah Provinsi Papua No. 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua disebutkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Papua mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah dan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini didukung dengan kajian yang dilakukan oleh Anzar dkk (2013) membuktikan bahwa Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen asset.

Faktor lain yang juga relatif mempunyai kontribusi terhadap pengaruh manajemen asset adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Sistem informasi sebagai salah satu upaya yang diperlukan untuk mengelola asset daerah juga dianggap penting, sesuai dengan PP No.56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Sistem Informasi Akuntansi dalam Sistem Perencanaan dan Pengendalian Sektor Publik mempunyai arti dan peran penting terkait pada fungsinya dalam pengukuran dan pengendalian. Sistem akuntansi yang dirancang secara baik, akan menjamin dilakukannya prinsip *stewardship* dan *accountability* dengan baik pula (Jones, dalam Afiah, 2009). Pernyataan ini sejalan dengan kajian yang ditemukan Budiono, (2009) hasil kajian membuktikan bahwa sistem informasi manajemen berpengaruh positif terhadap efektifitas pengelolaan asset KPPN Surakarta

Selain faktor-faktor yang telah diulas diatas, faktor komitmen juga berpotensi mempengaruhi pengelolaan asset daerah, khususnya komitmen yang bersumber dari pimpinan. Hal ini ditandai dengan adanya informasi-informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pimpinan yang tidak memperhatikan masalah asset membuat pengelolaan asset ini menjadi persoalan rumit (Simamora dan Halim, (2012).

Sejalan dengan pendapat diatas, Acep Joniheriyanto, (2012) juga menyatakan bahwa komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan terbentuk apabila pimpinan mampu mendistribusikan kekuasaannya sehingga dapat diterima dan dipandang sebagai sesuatu yang dapat mendorong untuk terciptanya komitmen yang tinggi dari seluruh personel organisasi. Pimpinan yang memahami kompleksitas atau keanekaragaman kemampuan, sikap, serta perilakudari personel organisasi akan dapat menjalankan strateginya dalam mempengaruhi bawahannya.

Pernyataan diatas juga didukung oleh hasil-hasil kajian empiris diantaranya adalah; Rudianto Simamora dan Abdul Halim, (2012) yang menyatakan bahwa

salah satu faktor yang mempengaruhi pengelolaan asset pasca pemekaran wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai daerah induk dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kota Padangsidimpuan sebagai daerah pemekaran adalah komitmen pimpinan. Sejalan dengan hasil tersebut, Mulyanto, (2010) dan Rachmawati K, (2010) juga menyatakan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja.

Menariknya, justru Syahrini Syukri, Haliah dan Kartini, (2015) menyatakan hasil yang berbeda yakni bahwa komitmen pimpinan tidak memengaruhi optimalisasi pengelolaan asset dan kualitas laporan keuangan. Ambivalensi hasil kajian inilah yang juga menjadi celah penelitian yang akan dibuktikan lebih lanjut dalam penelitian ini. Selain itu, variabel ini dimasukkan dalam model konseptual penelitian ini karena merupakan rekomendasi penelitian lanjutan oleh Mita Arlini, Darwanis, Syukriy Abdullah, (2014) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem informasi, regulasi dan kompensasi terhadap manajemen asset pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan kajian-kajian sebelumnya terkait manajemen asset daerah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah; (1) melihat pengaruh kualitas aparatur daerah terhadap manajemen asset pada Pemerintah Provinsi Papua; (2) melihat pengaruh regulasi terhadap manajemen asset pada Pemerintah Provinsi Papua; (3) melihat pengaruh sistem informasi terhadap manajemen asset pada Pemerintah Provinsi Papua; (4) melihat komitmen pimpinan terhadap manajemen asset pada Pemerintah Provinsi Papua; (5) Untuk menguji dan menganalisis kualitas aparatur daerah, regulasi, sistem informasi dan komitmen pimpinan terhadap manajemen asset pada Pemerintah Provinsi Papua secara simultan.

Menurut Garperzs (1997:5) memberikan pengertian kualitas dengan menyatakan bahwa : kualitas diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya perubahan kearah perbaikan terus menerus sehingga di kenal dengan istilah Q=MATCH (*Quality=Meets agreed Terms and Cange*).

Sedangkan Ahmad Batinggi (2007:217) yang menyatakan prinsip-prinsip layanan berkualitas sebagai berikut: (1) Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal; (2) Proses dan prosedur harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat; (3) System yang baik maka akan menciptakan kualitas yang baik; (4) Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan dan selera konsumen; (5)

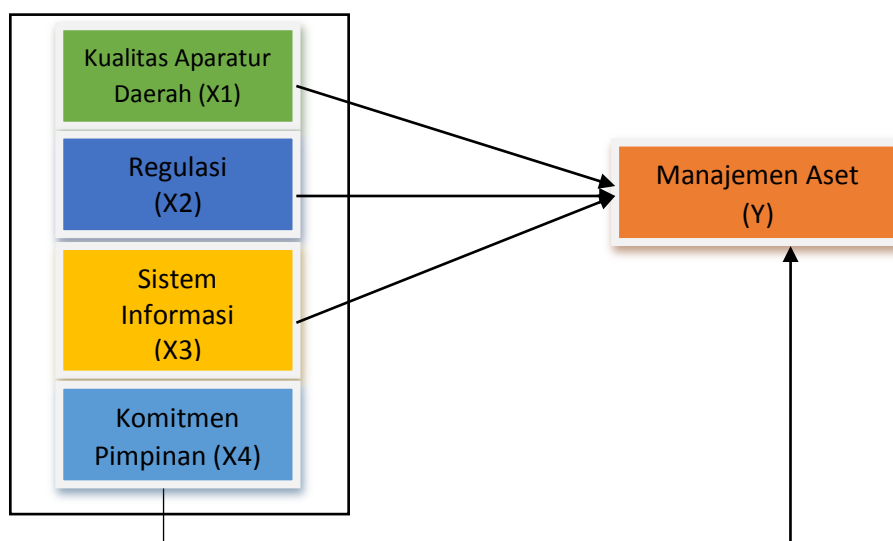
Kualitas menuntut kerja sama yang erat; (6) Peninjauan kualitas oleh para eksekutif, perlu dilakukan secara periodik.

Selanjutnya Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan “komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi”.

Menurut Jim (2007) dalam Hanis (2009:36), manajemen asset didefinisikan sebagai a continuous process-improvement strategy for improving the availability, safety, reliability and longevity of assets; that is systems, facilities, equipment and processes, yaitu suatu strategi proses-perbaikan yang terus menerus untuk meningkatkan ketersediaan, keamanan, keandalan dan umur panjang dari asset tersebut, yaitu: sistem, fasilitas, peralatan dan prosesnya.

Permendagri 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian



Modifikasi Azhar1, Darwanis, dan Abdullah (2013) dengan menambahkan variabel komitmen pimpinan.

METODE PENELITIAN

Proses pelaksanaan kajian meliputi : penelitian penjelasan (*explanatory*), jenis data primer dan data sekunder sebagai sumber data utama serta tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuisiner, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kualitas Aparatur, persepsi responden terhadap kualitas aparatur dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Kualitas Aparatur

Item	Frekuensi Jawaban							Rata-rata
	5	4	3	2	1	Total		
	F	F	F	F	F	F	%	
Ketersediaan operator	25	63	25	6	5	124	100	3.78
Staf minimal lulusan D3	19	71	33	-	1	124	100	3.86
Kesesuaian uraian tugas	71	41	11	-	1	124	100	4.46
Ketersediaan pedoman	17	84	22	-	1	124	100	3.94
Pelaksanaan proses pengelolaan asset daerah	19	83	17	4	1	124	100	3.93
Sumber daya pendukung operasional	24	70	21	8	1	124	100	3.87
Pelatihan penguasaan dan pengembangan keahlian	32	71	19	1	1	124	100	4.06
Rata-rata Kualitas Aparatur Daerah;								3.98

Sumber: data diolah, (2016)

Tabel 1.1. nilai rata-rata kualitas aparatur adalah sebesar 3.98. Hal ini berarti bahwa responden setuju dengan seluruh pernyataan tentang kualitas aparatur atau secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa kualitas aparatur pengelola asset pada pemerintah Provinsi Papua dapat mempengaruhi manajemen aset daerah di Pemerintah Provinsi Papua.

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Regulasi, Persepsi responden terhadap regulasi yang teraktualisasi dalam 4 pernyataan dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Tentang Regulasi

Item	Frekuensi Jawaban							Rata-rata
	5	4	3	2	1	Total		
	F	F	F	F	F	F	%	
Kebutuhan regulasi	39	64	17	3	1	124	100	4.10
Kesesuaian regulasi	36	70	13	5	-	124	100	4.10
Pemahaman regulasi oleh pegawai	22	73	24	5	-	124	100	3.90
Ketersediaan unit pengelola di bawah SKPD dalam mengurus dan menyimpan asse	26	77	20	1	-	124	100	4.03
Rata-rata Regulasi ;								4.03

Sumber; data diolah, (2016)

Tabel 1.2, diatas menunjukkan bahwa nilai mean (nilai rata-rata) persepsi tentang regulasi adalah sebesar 4.03. Hal ini berarti bahwa responden atau pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua setuju dengan seluruh pernyataan tentang regulasi atau secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa regulasi dipersepsikan mampu mempengaruhi pengelolaan atau manajemen aset daerah.

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Sistim Informasi, Persepsi respondent terhadap sistim informasi dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Sistim Informasi

Item	Frekuensi Jawaban							Rata-rata
	5	4	3	2	1	Total		
	F	F	F	F	F	F	%	
Kecukupan peralatan komputer	14	78	30	1	1	124	100	3.83
Ketersediaan jaringan internet	16	78	29	-	1	124	100	3.87
Pemanfaatan jaringan internet	24	73	26	-	1	124	100	3.96
Proses pencatatan secara komputerisasi	19	68	35	1	1	124	100	3.83
Penggunaan <i>software</i> yang sesuai peraturan perundang-undangan	29	71	23	-	1	124	100	4.02
Laporan yang terintegrasi	31	72	20	-	1	124	100	4.06
Pendataan asset rusak tepat waktu	33	77	12	1	1	124	100	4.13
Rata-rata Sistim Informasi ;								3.95

Sumber: data diolah, (2016)

Tabel 1.3. nilai rata-rata persepsi tentang sistim informasi adalah sebesar 3.96. Hal ini berarti bahwa responden setuju dengan seluruh pernyataan tentang sistim informasi atau secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sistim informasi dipersepsikan mampu mempengaruhi pengelolaan aset.

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Komitmen Pimpinan, Persepsi responden terhadap komitmen pimpinan dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.4 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Komitmen Pimpinan

Item	Frekuensi Jawaban							Rata-rata
	5	4	3	2	1	Total		
	F	F	F	F	F	F	%	
Penjelasan metode oleh pimpinan kepada bawahan	35	80	8	1	-	124	100	4.20
Penekanan pimpinan tentang keterlibatan penuh semua pegawai	27	74	19	3	1	124	100	3.99
Komitment untuk kerja keras	39	72	11	2	-	124	100	4.19
Pemberian sanksi	34	69	20	1	-	124	100	4.10
Evaluasi kerja	21	91	11	1	-	124	100	4.06
Kesempatan untuk melakukan tugas lain	41	72	10	1	-	124	100	4.23
Rata-rata Komitmen Pimpinan;								4.12

Sumber: data diolah, (2016)

Tabel 1.4. diatas nilai rata-rata persepsi tentang komitmen pimpinan adalah sebesar 4.12. Hal ini berarti bahwa responden setuju dengan seluruh pernyataan tentang komitmen pimpinan atau secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa komitmen pimpinan pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dapat mempengaruhi manajemen aset daerah provinsi Papua.

Frekuensi Jawaban Responden Tentang Manajemen Aset, Persepsi responden terhadap manajemen aset dengan menggunakan teknik pengukuran angka indeks rata-rata terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.5 Frekuensi Jawaban Responden Tentang Manajemen Aset

Item	Frekuensi Jawaban							Rata-rata
	5	4	3	2	1	Total		
	F	F	F	F	F	F	%	
Keputusan diambil sesuai dengan fungsi, wewenang dan tanggung jawab	28	67	28	-	1	124	100	3.98
Kesesuaian pengelolaan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan	47	62	12	-	2	124	100	4.23
Transparansi dalam pengelolaan	22	85	14	-	3	124	100	3.99
Pengarahan untuk pengelolaan barang milik daerah sesuai batasan standar	42	64	16	2	-	124	100	4.16
Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan barang milik daerah	40	76	8	-	-	124	100	4.26
Ketepatan jumlah dan nilai barang	35	79	8	1	1	124	100	4.18
Rata-rata Manajemen Aset;								4.13

Sumber : data diolah, (2016)

Tabel 1.5. nilai rata-rata persepsi tentang manajemen aset sebesar 4.13. Hal ini berarti bahwa seluruh responden setuju dengan seluruh pernyataan tentang manajemen aset.

Pengaruh kualitas aparatur terhadap manajemen aset Pemerintah Provinsi Papua, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kualitas aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi kualitas aparatur sebesar 0,166, artinya bahwa setiap kenaikan 100 persen kualitas aparatur maka secara relatif akan meningkatkan nilai manajemen aset sebesar 16,6 persen.

Hasil penelitian ini didukung oleh analisis deskriptif yakni distribusi frekuensi jawaban responden yang menunjukkan bahwa responden cenderung setuju dengan seluruh pernyataan kualitas aparatur.

Hasil dari penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Iqlima Azhar, Darwanis, Syukriy Abdullah, (2013) yang menyatakan bahwa kualitas

aparatur tidak berpengaruh terhadap manajemen aset. (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh), namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Inayah (2010) dalam Rudianto Simamora dan Abdul Halim (2013) menunjukkan bahwa faktor sumber daya dominan mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kota Tangerang dari ke empat faktor yang diadopsi dari Teori Edward III dalam hal implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, sikap/disposisi dan struktur birokrasi. Dalam teori Edward III (Winarno: 2012) dijelaskan lebih rinci bahwa sumber daya tersebut bisa berupa staff, informasi, kewenangan, fasilitas dan lain-lain. Sumber daya manusia merupakan hal pertama yang dirasakan sebagai faktor kendala sumber daya manusia yang kurang dalam hal ini adalah pengetahuan tentang pengelolaan aset. Pengetahuan tersebut bisa berupa pemahaman tentang prosedur pengelolaan aset dan juga tata cara penatausahaan Menurut Rudianto Simamora dan Abdul Halim (2013). Dukungan penelitian ini juga sejalan dengan hasil kajian Luhur Nurmala Rizqi, dkk., (2012) yang menyatakan bahwa penatausahaan aset atau barang milik daerah melalui SIMBADA Pemerintah Kabupaten Malang memerlukan sumberdaya manusia khususnya pengelola aset atau barang milik daerah yang berlatar belakang teknologi informasi.

Sumber daya manusia khususnya aparatur merupakan pilar utama dalam lingkungan organisasi yang akan mempengaruhi terwujud atau tidaknya tujuan organisasi. Kalau organisasi pemerintah dalam operasionalnya, sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan terhadap publik. Oleh karena itu, sumber daya aparatur merupakan salah satu pilar untuk mencapai tujuan organisasi pemerintah itu sendiri. Dalam konteks pemerintah maka sumber daya aparatur itu akan tercermin dari personal atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada dalam pemerintah tersebut terutama dalam pengelolaan aset daerah.

Dalam pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Papua Kualitas aparatur menjadi suatu perhatian khususnya pada SKPD dilihat dari jenjang pendidikan pengelola aset yang menunjukkan tingkat pendidikan pengelola aset yang memadai. Begitu juga dari informasi responden bahwa peningkatan kapasitas pengelola aset terutama pengurus barang dan penyimpan barang sering mengikuti bimtek maupun penelitian baik yang dibiayai dari anggaran SKPD maupun bimtek/diklat yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua serius dalam penataan aset daerah.

Pengaruh regulasi terhadap manajemen aset Pemerintah Provinsi Papua, Faktor regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi kualitas aparatur sebesar 0,476, artinya bahwa setiap kenaikan 100 persen kualitas aparatur maka secara relatif akan meningkatkan nilai manajemen aset sebesar 47,6 persen. Hasil penelitian ini didukung oleh Iqlima Azhar, Darwanis, Syukriy Abdullah, (2013) yang menyatakan bahwa kualitas aparatur berpengaruh terhadap manajemen aset pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh. (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh).

Hasil ini didukung oleh hasil analisis deskriptif jawaban responden yang menunjukkan bahwa item yang paling baik dalam menerangkan variable ini adalah item $X_{2.1}$ yang menyatakan bahwa "Regulasi diperlukan agar menjamin pengelolaan aset daerah dapat terlaksana secara baik."

Regulasi yang dimaksudkan dalam pernyataan variable ini adalah regulasi peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah (PP No.58/2005 Pasal 151 angka 2) dan PP No.58/2005 Pasal 5 angka 3 huruf b) yang menyatakan bahwa dalam mengelola barang milik daerah, kepala SKPD adalah pejabat pengguna barang daerah serta PP No.6/2006 yang menyatakan bahwa dibawah SKPD ada Pengurus Barang dan Penyimpan Barang dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan barang Daerah.

Regulasi memang merupakan jaminan yang harus ada agar pengelolaan aset daerah dapat terlaksana secara baik yang secara tidak langsung menjamin tidak akan terjadi penyimpangan atau kecurangan-kecurangan yang berpotensi muncul dalam tahapan manajemen aset daerah. Misalnya, pada tahapan pengadaan yang dalam kenyataannya merupakan tahapan yang relatif sulit.

Selain rawan dengan praktik korupsi, "ancaman" menjadi tersangka (lalu menjadi terpidana) cukup besar. Oleh karena itu, masalah yang paling sering muncul adalah mekanisme pengadaannya penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau tender bebas. Bahkan ada indikasi bahwa banyak aparatur daerah yang tidak mau menjadi panitia pengadaan karena takut terjerat kasus korupsi. Dengan adanya regulasi, maka seluruh proses atau mekanisme pengadaan akan menjadi lebih terjamin. Artinya pengelola aset daerah hanya perlu untuk mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya (termasuk proses pengadaan tersebut).

Selain itu regulasi sangat penting dalam pengamanan aset Pemerintah Provinsi Papua. Kondisi ini terjadi pada aset tanah dan aset peralatan dan

mesin. Dari penyajian laporan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2014 diperoleh bahwa asset tanah Pemerintah Provinsi Papua belum seluruhnya didukung dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah yaitu 197 persil belum didukung bukti dan 179 telah didukung dengan bukti kepemilikan. Begitu juga dengan asset peralatan dan mesin yang berkaitan dengan kendaraan dinas. Kenyataan dilapangan dibuktikan bahwa banyak pegawai yang tidak menduduki jabatan maupun yang telah pensiun tidak mengembalikan kendaraan dinas dan banyak kendaraan dinas yang sudah tidak layak pemakaian belum dilakukan penghapusan asset. Kondisi ini yang terus ditata oleh Pemerintah Provinsi Papua karena beberapa tahun terakhir hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Papua bahwa permasalahan dalam pemberiaan opini yang menjadi catatan salah satunya adalah pengelolaan asset.

Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Manajemen Asset Pemerintah Provinsi Papua, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kualitas aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen asset Pemerintah Provinsi Papua dan berkontribusi positif terhadap manajemen aset sebesar 23,5 persen. Hasil penelitian ini didukung oleh Iqlima Azhar, Darwanis, Syukriy Abdullah, (2013) yang menyatakan bahwa system informasi berpengaruh terhadap manajemen asset pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh.

Variable sistim informasi yang dalam kajian ini terukur melalui 6 item pernyataan dibuktikan bahwa sistim informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen asset pada Pemerintah Provinsi Papua. Dari analisis deskriptif menunjukkan bahwa nilai mean (nilai rata-rata) persepsi tentang sistim informasi adalah sebesar 3.96 yang berarti bahwa responden relatif setuju dengan seluruh pernyataan tentang sistim informasi atau secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa sistim informasi dipersepsikan mampu mempengaruhi manajemen aset pegawai.

Untuk mencapai tujuan pengelolaan aset secara terencana, terintegrasi, dan sanggup menyediakan data dan informasi yang dikehendaki dalam tempo yang singkat, diperlukan suatu sistem informasi pendukung pengambilan keputusan atas aset (*decision supporting system*), yang disebut sebagai Sistem Informasi Manajemen Aset (Siregar, 2004). Mardiasmo (2004) menjelaskan untuk pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang komprehensif dan handal sebagai alat pengambilan keputusan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban, selain itu juga bermanfaat

untuk dasar pengambilan keputusan mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD.

Memang harus diakui bahwa aset daerah hingga saat ini belum dikelola dengan efektif, efisien dan profitable bahkan yang sudah jelas terlihat prospeknya belum ditangani dengan pasti sehingga nilai aset daerah dipandang ringan oleh pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya. Hal ini akan menimbulkan masalah dalam penyalahgunaan aset daerah yang seharusnya dapat dicegah bila dilakukan peningkatan sistem informasi manajemen aset daerah sejak dini. Teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengelola aset daerah cukup dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan nilai kerugian yang sangat besar akibat kelalaian dalam pengelolaan aset daerah.

Pengaruh Komitmen Pimpinan Terhadap Manajemen Aset Pemerintah Provinsi Papua, Komitmen pimpinan dalam penelitaian ini berpengaruh dan berkorelasi positif terhadap manajemen aset. Ini menggambarkan bahwa dengan komitmen pimpinan yang kuat maka manajemen aset Pemerintah Provinsi Papua akan semakin baik. Kontribusi komitmen dalam manajemen aset Pemerintah Provinsi Papua sebesar 23,7 persen. Hal ini sejalan dengan Rudianto Simamora dan Abdul Halim, (2012) yang menyatakan bahwa salah satu factor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran di Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai daerah induk dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas dan Kota Padangsidimpuan sebagai daerah pemekaran daerah adalah komitmen pimpinan. Penelitian ini bertolak belakang dengan Syahrini Syukuri, Halina dan Kartini, (2015) yang meyatakan bahwa komitmen pimpinan tidak mempengaruhi optimalisasi aset dan kualitas laporan keuangan.

Varibabel komitmen pimpinan yang dalam kajian ini terukur melalui 3 yang diadopsi dari indikator komitmen oleh Allen dan Meyer, (1993) dalam Fuad Mas'ud, (2004) yakni; komitmen *affective*, komitmen *continuance* dan komitmen *normative* yang selanjutnya terurai dalam 6 item pernyataan. Hasil analisis pada Tabel 4.10 membuktikan bahwa komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen aset pada Pemerintah di Provinsi Papua. Hal ini dapat dilihat melalui koefisien regresi yang menunjukkan jika komitmen pimpinan meningkat maka peningkatannya akan diikuti oleh peningkatan manajemen aset.

Hasil analisis deskriptif melalui frekuensi jawaban responden tentang komitmen pimpinan menggambarkan bahwa pegawai di Pemerintah Provinsi Papua secara rata-rata memiliki komitmen *affective* tinggi. Hal ini dibuktikan

melalui pernyataan responden yang mengakui bahwa pimpinan satuan kerja telah menjelaskan metode datau cara pengelolaan asset yang berlaku di Provinsi Papua dan mereka sadar bahwa keberhasilan pengelolaan manajemen asset secara optimal bisa dicapai jika ada keterlibatan penuh dari semua pegawai.

Hasil yang sama juga terlihat pada indicator komitmen *normative* yang artinya bahwa pegawai pada Pemerintah Provinsi Papua secara rata-rata relatif memiliki komitmen *continuance* dan *normative* tinggi. Hal ini dibuktikan melalui jawaban responden yang mengakui bahwa akan ada banyak kerugian jika kami tidak menunjukkan kinerja yang baik, yakni berupa sanksi-sanksi sesuai dengan pakta integritas yang telah dibuat. Bukti lainnya tentang komitmen *normative* yaitu responden mangakui bahwa komitmen pimpinan dalam hal ini amatlah kuat karena pimpinan mereka selalu memberikan umpan balik dari apa yang mereka kerjakan bahkan mereka juga dibolehkan untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan lain selama tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok.

Uraian diatas secata tidak langsung menunjukkan bahwa komitmen yang tinggi terhadap organisasi akan terbentuk apabila pimpinan mampu mendistribusikan kekuasaannya sehingga dapat diterima dan dipandang sebagai sesuatu yang dapat mendorong untuk terciptanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai pada instansi yang dipimpinya. Pimpinan yang memahami kompleksitas atau keanekaragaman kemampuan, sikap, serta perilaku dari personel organisasi sangat berpotensi dapat menjalankan strateginya dalam mempengaruhi bawahannya.

Berpedoman kepada landasan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan barang daerah meliputi :1) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 2) Pengadaan, 3) Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, 4) Penggunaan, 5) Penatausahaan, 6) Pemanfaatan, 7)Pengamanan dan pemeliharaan, 8) Penilaian, 9) Penghapusan, 10) Pemindahtanganan, 11) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, 12) Pembiayaan, dan 13) Tuntutan ganti rugi.

Untuk itu sebagai seorang Kepala SKPD selaku Pengguna/Kuasa Pengguna Barang harus mempunyai komitmen kuat dalam pengelolaan asset karena Kepala SKPD adalah seorang manajer/pengelola terhadap barang yang dibawah kontrolnya.

Pengaruh Kualitas Aparatur, Regulasi, Sistem Informasi Dan Komitmen Secara Simultan Terhadap Manajemen Asset Pemerintah Provinsi Papua, Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa kualitas aparatur, regulasi, sistem informasi dan komitmen secara simultan atau bersama-sama berpengaruh

terhadap manajemen asset Pemerintah Provinsi Papua yang ditunjukkan dengan nilai kontribusi sebesar 89,6 persen. Faktor-faktor tersebut menggambarkan bahwa apabila kualitas aparatur, regulasi, sistem informasi dan komitmen berjalan dan diterapkan dengan baik oleh pengelola asset maka manajemen asset Pemerintah Provinsi Papua akan semakin baik. Tanggapan hasil BPK RI Perwakilan Papua terhadap pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2015 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) membuktikan bahwa dengan konsistensi faktor-faktor tersebut jika dijalankan dengan baik maka manajemen asset semakin baik yang pada akhirnya *good and clean governance* akan tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kualitas aparatur berpengaruh signifikan dan berkorelasi positif serta berkontribusi terhadap Manajemen Asset Pemerintah Provinsi Papua. Oleh karena itu, peningkatan kualitas aparatur perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal dan diklat teknis terkait. Hal lain yang bisa dilakukan adalah penempatan staf harus sesuai dengan kompetensi yang ada.

Faktor regulasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen asset pada Pemerintah Provinsi Papua. Untuk itu, keberadaan regulasi yang mengikat menjadi titik berat dalam penanganan asset daerah. Regulasi tersebut dapat diterjemahkan ke dalam aturan yang lebih terperinci dan teknis seperti *standard operating procedure* (SOP).

Faktor sistem informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen asset pada Pemerintah Provinsi Papua. Penggunaan aplikasi teknologi informasi tersebut sudah menjadi bagian yang penting untuk mengelola asset daerah karena akan lebih efisien dan akurat.

Faktor komitmen pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen asset Pemerintah Provinsi Papua, sehingga pimpinan SKPD yang notabene adalah penanggung jawab penggunaan asset harus membuat komitmen secara tertulis dalam bentuk pakta integritas.

Kualitas aparatur, regulasi, sistem informasi dan komitmen pimpinan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen asset. Keempat faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam mengelola asset daerah, sehingga diperlukan perhatian dan tindakan untuk meningkatkan ukuran terhadap kelima faktor tersebut.

2. Saran

Untuk meningkatkan kualitas aparatur perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat), bimbingan teknis secara reguler bagi pengelola Barang Milik Daerah bagi Pimpinan SKPD selagu penggunaan barang, pengurus barang dan penyimpan barang maupun Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Papua.

Penerapan regulasi sebagai acuan dasar dalam pengelolaan asset daerah perlu diterapkan melalui sosialisasi pada semua tingkatan secara berjenjang di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, sehingga pelaksanaan pengelolaan asset daerah dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk pengendalian asset Pemerintah Provinsi Papua saat ini dan akan datang perlu menggunakan Sistem Informasi yang terpadu berbasis teknologi data base yang tersentral antara pengelola asset ditingkat SKPD sampai dengan Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, sehingga pengaman asset akan terus terjaga.

Konsistensi dari Komitmen pimpinan SKPD diperlukan guna menggerakkan semua sumberdaya aparatur dalam pengelolaan asset dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Acep Joniheriyanto, (2012) Pengaruh Komitmen Pemimpindan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Galuh.
- Afiah, Nunuy Nur. 2009. Pengaruh Kompetensi Anggota DPRD dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. Oktober 2009.
- Allen, NJ., Meyer PJ. And Smith CA., (1993) Commitment to Organizations and Occupations: Extention and Test of a Three-Component Conceptualization, Journal of Applied Psychology, Vol. 78, No. 4.
- Arikunto, S. (2003). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Azwar, Azrul, (1996). *Menjaga Mutu Peayanan Kesehatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Batinggi, Achmad, (2007). *Manajemen Pelayanan Umum*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Budiono Sri Hendrikus (2009). Pengaruh System Informasi Manajemen dan System Akuntansi Pusat Terhadap Efektifitas Pengelolaan Asset Negara pada KPPN Surakarta.
- Desmiyawati, (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keandalan dan Ketepatan waktu Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Pemda Riau), Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2, April 2014, ISSN; 2337 4314.
- Flippo, Edwin B, (1995). *Manajemen Personalia*, Edisi VI, PT. Erlangga, Jakarta.
- Gazpersz, Vincent, (1997). *Manajemen Kualitas, Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total*, Gramedia, Jakarta.

- Hullah, A. R., S. Pangemanan, S. Tangkumandan N. Budiarmo. (2012). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pada Pemerintahan Sulawesi Utara, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol 3 – No 2: Halaman 9-21.
- IqlimaAzhar¹, Darwanis, Syukriy Abdullah, (2013). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset (Studi pada SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. Volume 2, No.1 Februari 2013.
- Jogiyanto. HM. (2005). *Sistem Teknologi Informasi: Pendekatan Terintegrasi: Konsep Dasar, Teknologi, Aplikasi, Pengembangan dan Pengelolaan*. Edisi 2. Yogyakarta: Andi Offset.
- Johnson Dongoran, (2001) *Komitmen organisasional: Dua Sisi Sebuah Koin*, Dian Ekonomi, 7 (1), hal. 35-56.
- Kadir, A., (2003). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Koswara, (2001). *Dinamika Informasi Dalam Era Global*, CV. Rajawali. Jakarta.
- Kurniawan, W., (2008). *Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Azka Press.
- Luthans, Fred, (1995) *Organizational Behavior, Seventh Edition*, Boston: McGraw-Hill, Inc.
- Luthans, Fred. (2006). *Perilaku Organisasi, (Alih Bahasa V.A Yuwono, dkk)*, Edisi Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Andi.
- LAN. (2007). *Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah*. Modul I: Dasar-dasar Manajemen Aset/Barang Milik Daerah.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mas'ud, F., (2004) *Survai Diagnosis Organisasional – Konsep dan Aplikasi*. Badan Penerbit - UNDIP, Semarang.
- Maxwell C. John, (2001), *21 Kualitas Kepemimpinan Sejati*, Terjemahan Drs. Arwin Saputro, Interaksara.
- MitaArlini, Darwanis, Syukriy Abdullah, (2014) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Regulasi dan Kompensasi Terhadap Manajemen Aset (Studi Pada Satuan Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Indonesia), *Jurnal Magister Akuntansi*, ISSN 2302-0164, Volume 3, No. 4, November 2014, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, pp. 66 – 75.
- Mowday, R. T., R. M. Steers dan I. W. Porter, (1979) The Measurement of Organizational Commitment, *Journal of Applied Psychology*, 84, p.408-414.
- Mulyanto, (2010) Pengaruh Perencanaan Karier, Penilaian Prestasi, Pemberian Tunjangan Kinerja dan Komitmen Pimpinan Terhadap Prestasi Kerja (Studi pada Kantor Pengadilan Negeri di Wilayah Ex – Karesidenan Kedu)
- Nasution, MN, (2005). *Manajemen Mutu Terpadu*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rachmawati K., (2010) Pengaruh Komitmen Pimpinan dan Penerapan Pilar Dasar Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial pada Perusahaan Mebel di Kabupaten Ngawi, *Media Soerjo* Vol. 7 No. 2. Oktober 2010, ISSN 1978 – 6239.
- Research Days. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran.
- Riorini, Sri Vandayuli, (2004). *Quality Performance dan Komitmen Organisasi*, *Jurnal Media Riset Bisnis dan Manajemen*, PT. Erlangga, Jakarta.
- Robbins dan Judge. (2008). *Perilaku Organisasi*, Edisi Dua belas, Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Rucky, Ahmad S, (2003). *Sumber Daya Manusia Berkualitas (Mengubah Visi Menjadi Realitas)*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Simamora, Rudianto dan Halim, Abdul, (2012) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Aset Pasca Pemekaran Wilayah dan Pengaruhnya Terhadap

- Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Kab. Tapanuli Selatan, Jurnal EkonomidanBisnis. Volume 10. Nomor 01. Maret 2012.
- Sedarmayanti, (2003). *Pestrkturisasi dan Pemerdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Penerbit Mandar Mju,Bandung.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methoda for Business; ASkilll Building Approach*. John Wiley and Sons, Inc. Singapore 3rdEdition.
- Siagian, (1998). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- (1994). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi*, BumiAksara, Jakarta.
- Siregar, Doli D. (2004). *ManajemenAset*. Jakarta: Gramedia PustakaUtama.
- Sugiono, (2008). *Statistik UntukPenelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Alfa beta, Bandung.
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasi*, Andi, Yogyakarta.
- Supriyatna, (2000). *Akutabilitas Pemerintahan Dalam Administrasi Publik*, Penerbit CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Syahrni Syukri, Haliah dan Kartini, (2015) Pengaruh Inventarisasi Aset, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen PimpinanTerhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KabupatenTakalar, Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*. Citra Umbara. Bandung.
- , *Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Fokus Media. Bandung.
- , *Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*. Citra Umbara. Bandung.
- , *Undang-Undang No. 33 tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Citra Umbara. Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- [http://syukriy.wordpress.com/2009/04/25/optimalisasi-pengelolaan-aset-daerah/diunduh 23/02/2016](http://syukriy.wordpress.com/2009/04/25/optimalisasi-pengelolaan-aset-daerah/diunduh%2023/02/2016).